



“Tema: 2 (pengelolaan wilayah kelautan, pesisir dan pedalaman)”

**REKAYASA SOSIAL ALTERNATIF MODEL REVITALISASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKOWISATA *MANGROVE*
BERBASIS CLUSTER POTENSI LOKAL DESA WISATA KAMPUNG
LAUT SEGARA ANAKAN – CILACAP**

Oleh

Edy Suyanto¹, Fx. Wardiyono², Tri Rini Widyastuti²

¹Prodi Sosiologi FISIP Unsoed dan Prodi S2 Lingkungan PPs Unsoed

²Prodi Sosiologi FISIP Unsoed

edysuyanto60@yahoo.co.id

ABSTRAK

Hutan *mangrove* di Segara Anakan semakin mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya, sebagian besar akibat perilaku manusia bersifat *antroposentrisme*, *transcendent* tidak *immanent* dan tidak *ekosentrisme* memperlakukan hutan *mangrove*. Salah satu solusi mempertahankan fungsi ekologis, sosialbudaya dan ekonomis kawasan hutan *mangrove* yaitu dengan menjual jasa lingkungan. Upaya pengembangan *ekowisata mangrove* dengan menggali potensi lokal masing-masing desa wisata di Kampung Laut Segara Anakan dan revitalisasi model kebijakan dalam pengelolaan ekowisata dan desa wisata. Tulisan ini membahas tentang rekayasa sosial alternative model revitalisasi kebijakan pengembangan ekowisata *mangrove* mendukung desa wisata Kampung Laut Segara Anakan. Metode penelitian *embedded research*, analisis isi, dan AHP (*analisis hirarkhi process*), teknik pengambilan informan dengan *purposive sampling*, analisis interaktif sebagai analisis data dengan tiga sumbu model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa potensi lokal tiap-tiap desa wisata mempunyai ciri khas, seperti kesenian kuda lumping, kentongan, upacara-upacara adat, kuliner hasil tangkapan, kerajinan berbahan *mangrove*, *home industry*, dapat dijual sebagai kenang-kenangan wisatawan dalam rangka ekowisata *mangrove* dan desa wisata *khas*. Potensi lokal bersifat fisik alami, dengan memanfaatkan ekosistem mangrove yang memiliki keunikan yang sangat berpotensi untuk mendukung desa wisata. Ekowisata tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan sosekbudekonomi lokal. berbasis potensi lokal di masing-masing klaster desa wisata. Alternatif rekayasa sosial model revitalisasi kebijakan pengelolaan ekowisata dengan memperhatikan sesuai prioritas aktor berbagai stakeholders, memperhatikan prioritas alternative dan kriteria dengan dukungan partisipasi masyarakat secara terpadu di wilayah Kampung Laut dalam mengelola sumberdaya alam dan sosekbud secara berkelanjutan, sehingga desa wisata bisa berkembang, masyarakat menjadi sejahtera dan fungsi lingkungan bisa terjaga.

Kata Kunci: *rekayasa sosial; ekoturisme mangrove; desa wisata.*

ABSTRACT



Mangrove forests in Segara Anakan are increasingly experiencing a decrease in quality and quantity, mostly due to anthropocentrism, transcendent immanent and non-eco centrist treating mangrove forests. One of the solutions to maintain ecological, socio-cultural and economic functions of mangrove forests is by selling environmental services. Efforts to develop mangrove ecotourism are carried out by exploring the local potential of each tourism village in Kampung Laut Segara Anakan and revitalizing the policy model in ecotourism management and tourism village. This paper discusses the alternative social engineering revitalization model of mangrove ecotourism development policies supporting the tourism village of Kampung Laut Segara Anakan. This research uses embedded research methods, content analysis, and AHP (Hierarchy Process Analysis). While the technique of taking informants using purposive sampling. Data analysis uses interactive analysis with three streams of interactive models from Miles and Huberman. The results show that the local potential of each tourism village has unique characteristics, such as kuda lumping (a type of folk dance that traditionally depicts the skills of horseback warriors, accompanied by gamelan, that aims to induce spiritual possession), kentongan (the traditional bamboo bell), traditional ceremonies, seafood culinary, handicrafts made from mangroves and home industry. All those local potentials can be sold as souvenir for tourists in the context of organizing mangrove ecotourism and typical tourism villages. Natural local potential is developed by utilizing a unique mangrove ecosystem that has the potential to support tourism village. Ecotourism is inseparable from local conservation, social, economic and cultural empowerment efforts based on local potential in each tourism village cluster. Alternative social engineering revitalization model of ecotourism management policies taking into account the actor priorities of various stakeholders, the alternative priorities and criteria with the support of Kampung Laut integrated community participation in managing natural resources and socio-economic and cultural resources in a sustainable manner, so that tourism village develops, and the society becomes more prosperous and environmental functions can be maintained.

Key words: social engineering; mangrove ecotourism; tourist village.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan ekosistem *mangrove* untuk ekowisata sejalan dengan pergeseran minat wisatawan melakukan wisata tanpa ada unsur pendidikan dan konservasi (*old tourism*) untuk menjadi wisatawan yang datang dengan tujuan melakukan wisata yang ada unsur pendidikan, budaya dan konservasi didalamnya (*new tourism*), untuk mengelola dan mencari daerah tujuan ekowisata yang spesifik alami dan kaya akan keanekaragaman hayati serta kearifan lokal masyarakat kawasan wisata tersebut.

Masalah kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan pada saat ini sangat menonjol dan menjadi isu internasional yang mendapat perhatian khusus, dan diakibatkan sebagian besar akibat perilaku manusia yang bersifat antroposentrisme, transcendent tidak immanent, tidak menganut paham ekosentrisme. Namun, demikian di sisi lain, justru kepariwisataan alam mengalami perkembangan yang meningkat dan signifikan. Kepariwisataan alam kemudian berkembang ke arah pola wisata ekologis yang dikenal dengan istilah ekowisata (*ecotourism*) dan wisata minat khusus (*alternative tourism*). Pergeseran dalam kepariwisataan internasional terjadi pada awal dekade delapan puluhan. Pergeseran paradigma pariwisata dari *mass tourism* ke individual atau kelompok



kecil, maka wisata alam sangat berperan dalam menjaga keberadaan dan kelestarian obyek dan daya tarik wisata (ODTW) alam pada khususnya dan kawasan hutan pada umumnya. Pergeseran paradigma tersebut cukup berarti dalam kepariwisataan alam sehingga perlu diperhatikan aspek ekonomi, ekologi, dan masyarakat lokal (Fandeli dan Mukhlison, 2000 *dalam* Gunarto, 2004).

Segara Anakan dengan lagunanya, terkenal sebagai kawasan hutan *mangrove* dengan wilayahnya seluas 14.519 ha. Penduduknya umumnya mata pencahariannya yaitu (a) perikanan *ishore fishery*, (b) perikanan laut (*offshore fishry*), (c) mata pencaharian pertanian. Kawasan *mangrove* Segara Anakan mempunyai potensi besar sebagai kawasan *keanekaragaman hayati*, sarana pendidikan dan *ekowisata*. Namun, saat ini kondisi *mangrove* sudah mengawatirkan, karena luas Segara Anakan semakin menyusut. Data BPKSA menyebutkan tahun 1903 masih 6.450 ha, tahun 1939 6.060 ha, tahun 1971 4.290 ha, 1992 tercatat 1.800 ha tahun 1999 tercatat tinggal 1.400 ha dan tahun 2.000 tercatat tinggal 500-600 ha, 2012 tinggal 527 ha dan tahun 2014 tercatat 500 ha (Sudarmadji, 2015). Segara Anakan dan Kampung Laut merupakan *ekosistem estuari* yang terdiri dari beberapa ekosistem yang sangat erat. *Ekosistem* ini meliputi wilayah perairan terbuka, tanah timbul, rawa air asin dan hutan *mangrove*. Hutan *mangrove* merupakan tempat dan habitat bagi kehidupan berbagai flora dan fauna yang sangat berharga. Laguna telah menyumbang produksi perikanan lebih 62 milyar rupiah per tahun dan akan semakin meningkat seiring semakin berfungsinya ekosistem, adapun nilai hutan *mangrove* mencapai 1.400 US dollar/ ha (Suyanto, 2017).

Badan Pengelola Kawasan Segara Anakan, pernah mencoba mengajak para *ekspatriat* yang bekerja di sejumlah perusahaan besar di Cilacap untuk berwisata di hutan bakau Segara Anakan. Ternyata mereka sangat kagum dengan kondisi *mangrove* Segara Anakan sehingga hal itu semakin meyakinkan untuk mengembangkannya sebagai daerah ekowisata khas, namun perlu regulasi dalam menentukan arah kebijakan tingkat Kabupaten Cilacap berbentuk Peraturan Daerah (Perda), karena sampai saat ini pengelolaan ekowisata *mangrove* pengelolaannya ditangani oleh pihak pemerintahan provinsi Jawa Tengah.

Keberadaan hutan bakau (*mangrove*) Segara Anakan memiliki peran penting dalam pengasuhan (*nursery ground*) dan tempat mencari makan (*feeding ground*) berbagai jenis burung yang bermigrasi, serta tempat pemijahan (*spawning ground*) berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Hal ini bisa jadi bahan untuk promosi sebagai tempat wisata yang berbasis lingkungan hidup dan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan (a) bagaimanakah potensi lokal yang dapat digali dalam rangka mengembangkan ekowisata *mangrove* dan (b) bagaimanakah rekayasa sosial dalam rangka menyusun perumusan alternative model kebijakan pengelolaan ekowisata *mangrove* berbasis potensi lokal di Segara Anakan Cilacap?



Sehubungan dengan hal itu, perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hutan *mangrove*, serta perlu upaya meningkatkan perekonomian masyarakatnya dengan menjual jasa lingkungan berupa pengembangan *wisata mangrove* dengan *ekoturisme* berupa desa wisata nelayan di kawasan Segara Anakan. juga perlu menggali potensi lokal yang ada di Wilayah Segara Anakan. Hal ini dengan membentuk dan mengembangkan desa wisata berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat dan potensi lokal berdasarkan cluster atau zone potensi desa wisata. Untuk mengatasi semakin "parahnya" *ekosistem mangrove* tersebut, maka penelitian bertujuan untuk (a) menggali potensi lokal yang dapat mendukung ekowisata mangrove dan (b) merumuskan rekayasa sosial alternative model kebijakan dalam pengelolaan *ekoturisme* kawasan hutan *mangrove* berbasis cluster potensi lokal dan kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan mixed method, yaitu untuk menggali potensi lokal adalah *embedded research* dan analisis isi, sedangkan analisis hierarkhi (Marimin, 2005), digunakan untuk merumuskan rekayasa sosial alternative model revitalisasi kebijakan pengembangan ekowisata. Penelitian dilakukan di 2 desa yaitu Ujunggagak dan Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut Segara Anakan. Informan meliputi masyarakat, birokrat, akademisi, anggota DPRD, Pokdarwis, perangkat desa, aktivis desa wisata mangrove. Penentuan sasaran menggunakan teknik *purposive sampling*, analisis data menggunakan analisis interaktif dan *Analysis hierarkhi Process (AHP)*. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Agustus 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Cluster Potensi lokal upaya mengembangkan desa wisata *khas mangrove*

Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bakal mengembangkan wisata bahari dan ekowisata *mangrove* di sekitar kawasan Segara Anakan dan Pulau Nusakambangan. "Wisata bahari dan ekowisata tersebut sedangdiragap pihak PEMKAB Cilacap di samping obyek-obyek wisata yang sudah ada. Ke depan diharapkan bisa menjadi wisata unggulan bagi Kabupaten Cilacap," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) Cilacap, Pengembangan wisata bahari dan ekowisata di Segara Anakan dan Pulau Nusakambangan sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang kemaritiman khususnya wisata pantai. "Secara kebetulan sebagian besar obyek wisata Cilacap merupakan wisata pantai.". Secara ekologis dan industri pariwisata, bahwa potensi wisata bahari dan ekowisata di laguna Segara Anakan maka sangat layak dipasarkan baik ke wisatawan domestic maupun wisatawan luar negeri (Detic.Com, 2017).



Cluster Potensi lokal berbentuk kearifan lokal, salah satunya adalah upacara Sedekah Laut. Namun demikian, acara ini dalam perkembangannya waktu, terjadi pro dan kontra dilihat dari segi agama Islam dan budaya, pada kegiatan upacara laut ini. Oleh karena itu, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap, akhirnya mengemas tradisi budaya sedekah laut, menjadi Festival Budaya Nelayan, yang digelar pada tanggal 27 – 29 September 2019 (Suara Merdeka, 2019).

Berdasarkan analisis isi, Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporpar) Kabupaten Cilacap, Heroe Harjanto (HH), mengemukakan bahwa karena adanya berbagai polemic yang muncul pada tahun 2018, dilakukan perubahan pelaksanaan "Sedekah Laut" ini, menjadi Festival Budaya Nelayan. Hal ini dilakukan untuk "meredam" polemic, karena adanya pendapat bahwa ditinjau dari sudut agama Islam, bahwa acara ini dianggap musrik serta bertentangan dengan hukum agama. Sebagaimana diketahui, bahwa acara sedekah laut ini dilakukan pada setiap bulan Sura, untuk melestarikan budaya ini, dan tidak terjadi polemic, maka dirubah namanya menjadi Festival Nelayan. Selanjutnya HH, menjelaskan bahwa adanya pengemasan tradisi menjadi atraksi wisata yang menarik di Kawasan Laut, Segara Anakan, menarik wisatawan dan tidak merubah makna dari nilai budaya di kalangan nelayan tersebut. Rangkaian acara Festival Nelayan ini akan dimeriahkan dengan Festival Kuliner dan jamu se Jawa Tengah yang digelar oleh Provinsi Jawa Tengah di Cilacap (Suara Merdeka, 2019).

Acara Festival Budaya Nelayan ini, membawa dampak positif kepada masyarakat Kampung Laut, karena itu acara ini diagendakan tiap tahun, hal ini dapat mengembangkan ekowisata *mangrove* di Segara Anakan, akibat dari kegiatan Festival Nelayan ini.

Kegiatan kearifan lokal di wilayah Segara Anakan Kampung Laut Cilacap, yang sudah mentradisi, walaupun pro dan kontra dalam pelaksanaannya, ternyata tetap digelar oleh nelayan dalam acara "sedekah laut" yang dikemas dalam Gelar Festival Budaya Nelayan 2019. Pelaksanaan Gelar Budaya "Sedekah Laut" dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019. Dalam proses "sedekah laut" dilarung 10 *jolen* (tempat sasaji) yang berisi sesaji untuk penguasa laut di Laut Kidul Prosesnya ke sepuluh *jolen*, masing-masing tunggul dipikul untuk dinaikkan ke atas perahu yang sudah disiapkan di Pantai Teluk Penyu Cilacap. *Jolen* tersebut kemudian di sekitar Pulau Mejethi yang berada di selatan Pulau Nusakambangan.

Potensi lokal yang ada di wilayah Kampung Laut-Segara Anakan, perlu di kembangkan dan dikelola dengan partisipasi aktif masyarakat, hal ini untuk mendukung ekowisata hutan *mangrove* dan desa wisata dengan dibuat cluster potensi lokal yang ada di tiap-tiap desa wisata. Oleh karena itu pengembangan ekowisata harus dilakukan secara berkelanjutan, yaitu dengan memperhatikan lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi. Strategi pengembangan ekowisata desa wisata mangrove berbasis kearifan lokal masyarakat Kampung Laut, merupakan suatu perencanaan kegiatan yang cukup rumit apabila tidak di dukung oleh masyarakat Kampung



Laut dan berbagai stakeholders terkait. Pengembangan potensi lokal, baik potensi fisik maupun potensi sumberdaya manusia, budaya dan kearifan lokal yang ada pada masyarakat sekitar sebagai penyangga ekowisata *mangrove* Segara Anakan dan desa wisata. Sebagai contoh potensi lokal yang ada berupa ketoprak, calung, tapi sekarang tinggal kuda lumping. Pentasnya ada hajatan, terutama sunatan, untuk mengiringi yang sunat, belum dipentaskan di depan wisatawan. Latihannya untuk anak-anak sekolah. Untuk itu, maka strategi yang perlu dilakukan adalah perlu adanya aktor yang dapat membina dan memasarkan untuk kesenian tersebut agar bisa ditawarkan sebagai paket wisata *mangrove* di desa wisata Kampung Laut, sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat pesisir. Teori tindakan sosial dari Max Weber terhadap pengembangan ekowisata dan desa wisata *mangrove*. Tindakan sosial menurut Weber, bahwa individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukanlah alat yang statis dari paksaan dan fakta sosial. Ini berarti, bahwa tindakan sosial tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan segala hal yang ada dalam konsep fakta sosial. Ritzer (dalam Anak Agung Istri Andriyani, 2017), menyebutkan (a) tindakan rasional tujuan, tindakan aktor menilai dan menentukan tujuan dan tindakan ini bisa dijadikan untuk mencapai tujuan lain. (b). tindakan rasional nilai, aktor memilih cara berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan. (c) tindakan efektif, tindakan aktor lebih didominasi kepura-puraan yang menjadikan aktor susah dipahami dan (d) tindakan tradisional, disini tindakan aktor merupakan tindakan lebih didasarkan atas kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu.

Pengembangan destinasi pariwisata hutan *mangrove*, dengan cluster potensi lokalnya, harus dimaknai sebagai strategi dalam pengembangan jumlah wisatawan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan destinasi lainnya secara keseluruhan termasuk potensi lokal masyarakat sekitar desa wisata *mangrove* (Ftri Abdillah *et al*, 2015). Namun demikian, pemerintah seharusnya pro-aktif dalam menggugah dan menggairahkan masyarakat, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara terpadu dengan memasarkan cluster potensi lokal yang ada di wilayah kampung Laut (Fatma, 2004).

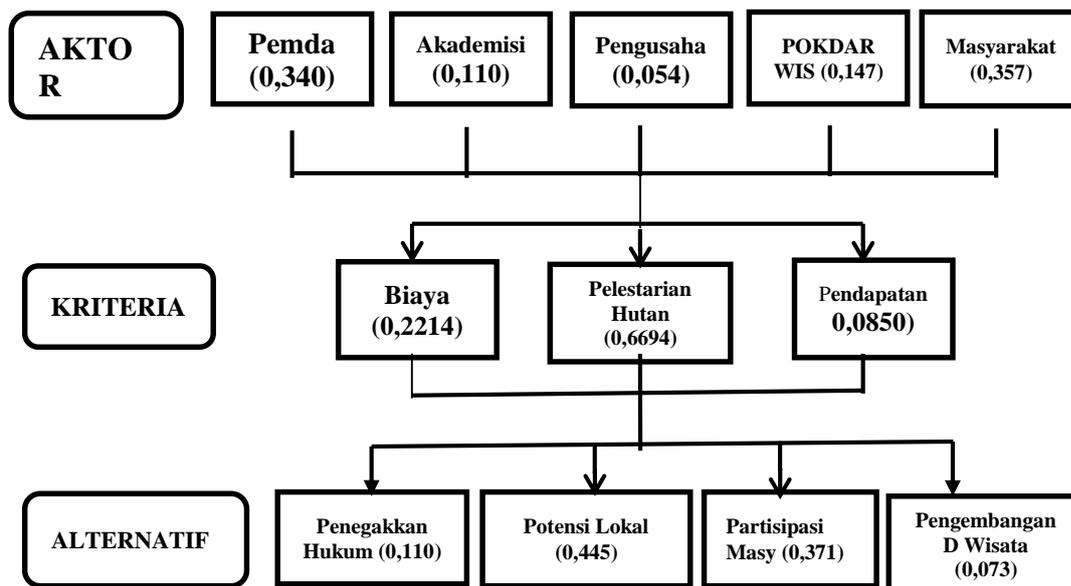
b. Rekayasa Sosial Alternatif Model Revitalisasi Kebijakan Pengelolaan Ekoturisme Hutan *Mangrove* Segara Anakan.

Proses penyusunan kebijakan dipengaruhi berbagai kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Hal *krusial* dalam pembuatan kebijakan adalah apa dan siapa yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut. Proses penyusunan kebijakan merupakan *chaos* dan implementasinya *tidak rasional*. Ini dikarenakan, proses penyusunan formulasi rumusan kebijakan merupakan (a) proses politik, (b) bersifat *incremental*, kompleks dan sulit menentukan kebijakan yang optimal, (c) konflik kepentingan *stakeholders*, (d)



implementasinya selalu terjadi proses “negoisasi”, (e) sering mengeluarkan perspektif kemiskinan dan *marginalisasi*.

Hasil analisis data berdasarkan penilaian tingkat kepentingan masing-masing kelompok pemangku kepentingan dalam rangka rekayasa sosial alternative model revitalisasi kebijakan dalam pengelolaan ekowisata mangrove, seperti aktor pemerintah daerah, akademisi, pengusaha/investor, POKDARWIS, dan masyarakat (level 2) terhadap aspek biaya, pelestarian fungsi hutan mangrove dan pendapatan (level 3), hasil proses AHP, dapat disajikan, dalam **Gambar 1**.



Gambar 1. Hierarki model alternatif kebijakan pengelolaan *mangrove*

Gambar 1, tentang rekayasa sosial model alternative revitalisasi kebijakan pengelolaan ekowisata mangrove, hasil analisis AHP, diketahui bahwa aktor *stakeholders* yang paling berpengaruh terhadap revitalisasi kebijakan pengelolaan ekowisata hutan *mangrove* prioritas pertama adalah aktor masyarakat nelayan, yang sangat merasakan dampak dari kegiatan ekowisata *mangrove* ini. Kedua adalah aktor Pemerintah daerah, yang mempunyai wewenang mengatur aktifitas ekowisata, prioritas ketiga kelompok sadar wisata (POKDARWIS), selaku aktivitis yang bergerak di bidang ekowisata dan sebagai wakil dari kelompok masyarakat setempat yang peduli terhadap kegiatan ekowisata *mangrove*, keempat adalah aktor Akademisi dan prioritas kelima aktor Pengusaha/investor yang mendanai pengelolaan ekowisata *mangrove*. Hasil pembobotan nilai AHP dapat disimpulkan bahwa prioritas utama aktor masyarakat yang paling tinggi terhadap penentuan alternative kebijakan pengelolaan hutan *mangrove* di Segara Anakan. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, sangat diperlukan agar tidak terjadi “benturan” dalam pengelolaan ekowisata hutan *mangrove*. Berdasarkan AHP tentang nilai pembobotan antar pemangku kepentingan, disajikan pada **Tabel 1**.



Tabel 1. Nilai pembobotan pada level kriteria masing-masing *stakeholders*

No	Pemangku kepentingan (level 2)	Aspek kriteria (level 3)	Bobot (Nilai)
1.	Pemerintah (Pemda)	Biaya	0,212
		Pelestarian Fungsi Hutan	0,702
		Pendapatan	0,086
2.	Akademisi	Biaya	0,202
		Pelestarian Fungsi Hutan	0,679
		Pendapatan	0,117
3.	Pengusaha/Investor	Biaya	0,253
		Pelestarian Fungsi Hutan	0,589
		Pendapatan	0,158
4.	POKDARWIS	Biaya	0,230
		Pelestarian Fungsi Hutan	0,672
		Pendapatan	0,098
5.	Masyarakat Nelayan	Biaya	0,224
		Pelestarian Fungsi Hutan	0,680
		Pendapatan	0,096

Sumber: Hasil proses analisis data lapangan, 2019.

Analisis hasil AHP dengan software *expert choice* tentang gabungan tentang pembobotan nilai pada level aspek kriteria dapat dijelaskan bahwa pengelolaan ekowisata hutan *mangrove* Segara Anakan cenderung lebih mementingkan pada aspek kriteria pelestarian fungsi hutan *mangrove* di Segara Anakan, agar kualitas dan kuantitas ekosistem hutan *mangrove* tetap terjaga secara berkelanjutan. Disamping itu juga berupaya tetap memperhatikan aspek atau kriteria biaya yang diperlukan untuk pengelolaan ekowisata *mangrove*. Juga aspek penghasilan nelayan serta penghasilan pemerintah daerah (APBD) meningkat, faktor ini juga penting diperhatikan, agar supaya terhindar dari konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan *mangrove* di Segara Anakan. Hasil proses analisis AHP diperoleh beberapa alternative formulasi rumusan kebijakan ekowisata fungsi hutan *mangrove* yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, dalam rangka pengelolaan hutan mangrove upaya mendukung terwujudnya desa wisata *mangrove*, dapat dilihat **Tabel 2.**

Tabel 2. Nilai prioritas alternative kebijakan ekowisata *mangrove* Segara Anakan

No.	Alternatif	Bobot	Prioritas
1.	Penegakan Hukum	0,110	3
2.	Potensi Lokal	0,445	1
3.	Partisipasi Masyarakat Nelayan	0,371	2
4.	Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan	0,073	4

Sumber: Hasil analisis proses data lapangan, 2019



Tabel 2 menunjukkan bahwa potensi lokal yang ada di wilayah Kampung Laut, dalam pengelolaan ekowisata *mangrove* merupakan prioritas pertama, kedua kedua keterlibatan partisipasi masyarakat, sedangkan prioritas ketiga adalah penegakan hukum, prioritas keempat adalah pengembangan desa wisata *mangrove*. Alternative kebijakan dalam pengelolaan ekowisata hutan *mangrove* menjadi prioritas utama adalah potensi lokal yang ada di wilayah tersebut yang perlu dikembangkan. Demikian hasil rekayasa sosial alternatif model revitalisasi kebijakan dalam pengelolaan ekowisata berbasis potensi lokal dan kearifan lokal masyarakat Kampung Laut Segara Anakan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Keberadaan hutan bakau Segara Anakan memiliki peran penting dalam pengasuhan (*nursery ground*) dan tempat mencari makan (*feeding ground*) berbagai jenis burung yang bermigrasi, serta tempat pemijahan (*spawning ground*) berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Hal ini bisa jadi bahan untuk promosi sebagai tempat wisata yang berbasis lingkungan hidup dan penelitian.

Potensi lokal masing-masing desa wisata, yang dapat dikembangkan dan perlu dukungan pemerintah dan stakeholder terkait adalah kesenian, kerajinan tangan dari bahan *mangrove*, kuliner makanan *khas* tiap-tiap desa wisata Kampung Laut, upacara adat, mitos yang ada, upacara adat, olah raga pantai, dan sebagainya.

Model alternatif kebijakan Pemda dalam pengelolaan *mangrove* mendukung desa wisata nelayan adalah memprioritaskan terhadap potensi lokal, baik fisik, sosialbudaya yang ada di wilayah Kampung Laut dan Hutan *mangrove* Segara Anakan, prioritas kedua adalah partisipasi masyarakat nelayan, disusul penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan keempat adalah pengembangan desa wisata sesuai potensi yang ada berdasarkan cluster atau zona potensi yang ada. Kriteria yang digunakan dalam perumusan kebijakan pengelolaan *mangrove*, yang menjadi prioritas pertama adalah pelestarian fungsi hutan *mangrove*, lalu prioritas kedua adalah faktor biaya, karena masyarakat akan merasakan dari biaya tersebut dan prioritas ke tiga adalah pendapatan nelayan dari keberadaan hutan *mangrove* dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap.

Pertimbangan kebijakan dari aspek aktor pelaku kebijakan pengelolaan ekowisata hutan *mangrove*, prioritas utama adalah masyarakat nelayan. Prioritas kedua pemerintah daerah. Prioritas ke tiga adalah POKDARWIS, akademisi dan terakhir adalah Pengusaha/investor sebagai penyandang dana dalam pengembangan ekowisata *mangrove* dan desa wisata.

Saran

Mengingat masyarakat masih belum menyadaripentingnya potensi lokal dapat mendukung desa wisata di Kampung Laut, disarankan perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang



pentingnya potensi lokal bagi kehidupan nelayan dan lingkungan secara umum. Selanjutnya perlu di buat *clustear potensi lokal*, supaya tearlihat potensi khas amasing-masing desa wisata di Kampung Laut ini, dan agar masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab sesuai kapasitas dan kapabilitasnya dalam pengembangan desa wisata secara berkelanjutan, sesuai kapasitasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat Rektor Unsoed dan Ketua LPPM Unsoed, yang telah memberi kesempatan dan mendanai penelitian ini, sehingga dapat terlaksana dan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andereck, K., dan Vogt, C. 2000. The Relationship Between Residents Attitudes Toward Tourism and Tourism Development Options. *Journal of Travel Research* 34(1): 27 – 36
- Andriyani, A. A. I. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah: Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali. *Jurnal Ketahanan Pangan Nasional* 34(1): 1 – 11
- Fatma E Widayati. 2004. *Perkembangan Masyarakat Di Wilayah Terisolir di Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap*. Thesis. Yogyakarta. UGM.
- Fitri, Abdillah. Janianton, Damanik. Chafid Fandeli. Sudarmaji. 2015. Perkembangan Destinasi Pariwisata dan Kualitas Hidup Masyarakat Lokal. *Jurnal Mimbar* 31(2): 339 – 350
- Marimin. 2005. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria majemuk*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Okazaki, E. 2013. A Community Based Tourism Model: Its Conception and Use. *Journal of Sustainable Tourism* 16(5): 511 – 529
- Santosa, I., & Priyono, R.E. 2012. Diseminasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Agrowisata. *Jurnal Mimbar* 27(2): 181 – 190
- Sudarmadji. 2015. Rehabilitasi Mangrove dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, *Jurnal Ilmu Dasar* 2(2): 68 – 71
- Suyanto, Edy. 2017. Social Engineering on Mangrove Preservation Based on Fishermen's Local Wisdom. *Journal Mimbar* 33(1): 55 – 61